



# E-PAPER PERPUSTAKAAN DPR-RI

## <http://epaper.dpr.go.id>

---

**Judul** : Dukung Perekonomian Nasional, Novita Hardini Harap Sektor Ekraf Fokus Strategi Inovatif  
**Tanggal** : Kamis, 05 Desember 2024  
**Surat Kabar** : Website DPR  
**Halaman** : -

**PARLEMENTARIA, Jakarta** – Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menyoroti beberapa penting terkait tantangan besar yang dihadapi bangsa. Hal itu terutama dalam bidang ekonomi dan peran strategis ekonomi kreatif (Ekraf).

"Kita harus memahami tantangan besar bangsa ini terlebih dahulu sebelum merancang program kerja di bawah Kemene kraf. Situasi ekonomi nasional cukup memprihatinkan," ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi VII dengan Kementerian Ekonomi Kreatif / Kepala Badan Ekonomi Kreatif, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2024).

Novita mengungkapkan bahwa sekitar 50 persen masyarakat kelas menengah terancam jatuh ke kategori miskin akibat kondisi perekonomian yang mengalami deflasi dan penurunan daya beli. Hal ini, menurutnya, harus menjadi perhatian serius dalam merancang kebijakan, termasuk kebijakan kenaikan PPN 12 persen.

"Jika kenaikan PPN 12 persen diberlakukan, ini akan memaksa lintas generasi untuk konsumsi belanja produk maupun jasa akan menurun, dan ini berdampak langsung pada sektor Ekraf," tegasnya.

Politisi perempuan dari dapil VII Jawa Timur itu juga menyinggung pentingnya Ekraf sebagai salah satu penyumbang pendapatan negara terbesar. Pada 2017, sektor Ekraf mencatat kontribusi hingga Rp989 triliun, dari sektor kuliner, fashion, dan kriya sebagai penyumbang terbesar. Namun, ia mengkritisi minimnya perhatian pada pasar premium yang berpotensi besar.

"Kapan Ekraf akan masuk ke pasar premium dengan produk UMKM kita yang bercita rasa Indonesia? Kita punya potensi besar, seperti Sarinah. Kenapa kita tidak menciptakan brand lokal yang setara dengan Prada atau Louis Vuitton (LV)? Ini peluang besar untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus negara," ujar Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Sebagai solusi, Novita mengusulkan program komunal branding untuk produk fashion dan kriya. Ia menyarankan agar pemerintah memfasilitasi inkubasi produk UMKM sehingga dapat menciptakan satu brand premium yang kuat, misalnya dengan nama "Sarinah."

"Langkah ini tidak hanya akan mengangkat nilai produk lokal, tetapi juga memperkuat citra Indonesia di pasar global. Dengan komunal branding, kita bisa menghasilkan produk premium yang kompetitif, sehingga pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat meningkat," jelasnya. (bia/rdn)